

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DAN FATWA DSN-MUI  
TENTANG SPECIAL NISBAH DALAM AKAD DEPOSITO MUDARABAH  
(Studi Kasus di Bank Muamalat Cabang Surabaya Jl. Raya Darmo No. 81)



# SKRIPSI

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
Nb. KLAS K S-2012 0508 4	No REG : S.2012/14/48 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

HANNA 'ULYAUZ ZAKIYAH  
C02208054

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Muamalah

SURABAYA  
2012

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Hanna 'Ulyauz zakiyah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Juli 2012

Pembimbing,



**Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag**  
**Nip:196303271999032001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hanna 'Ulyauz Zakiyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag  
NIP.196303271999032001

Sekretaris,



Abu Fanani, M.Pd  
NIP.196906152007011051

Penguji I,



H. Abu Dzarrin A.H M.Ag  
NIP.197306042000031005

Penguji II,



Dr. Sri Warjiati, SH, MH  
NIP.196808262005012001

Pembimbing,



Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag  
NIP.196303271999032001

Surabaya, 30 Juli 2012

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP. 195005201982031002

## PERNYATAAN KEASLIAN

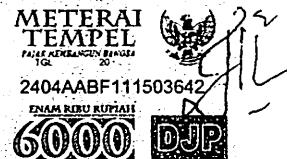
Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hanna 'Ulyauz Zakiyah  
NIM : C02208054  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah  
Judul Skripsi : *TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DAN FATWA  
DSN-MUI TENTANG "SPECIAL NISBAH" DALAM  
AKAD DEPOSITO MUDARABAH*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juli 2012

Saya yang menyatakan,



Hanna 'Ulyauz Zakiyah  
C02208054



## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DAN FATWA DSN-MUI TENTANG “SPECIAL NISBAH” DALAM AKAD DEPOSITO MUDARABAH (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya Jl. Raya Darmo no. 81)” ini merupakan hasil penelitian dokumen yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana aplikasi *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah di bank Muamalat? dan Bagaimana tinjauan masalah mursalah dan fatwa DSN-MUI terhadap *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir induktif, dimana penulis bermaksud untuk menggambarkan aplikasi *special nisbah dalam akad deposito mudarabah* di Bank Muamalat Surabaya ditinjau dari masalah mursalah dan fatwa DSN-MUI.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah merupakan akad perubahan bagi hasil deposito Mudarabah di Bank Muamalat Indonesia. Di dalam proses pengajuan akad tersebut, pihak nasabah menginginkan diberlakukannya akad bagi hasil yang baru yang lebih menguntungkan dan menghapus akad bagi hasil yang lama.

Dalam tinjauan masalah mursalah dan fatwa DSN-MUI, pelaksanaan *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah diperbolehkan, karena pihak bank maupun pihak nasabah memiliki pertimbangan sendiri-sendiri yang dijadikan acuan atau dasar. Segala pertimbangan tersebut nantinya akan mengerucut sebagai sebuah kemaslahatan bersama untuk menjaga eksistensi Bank Islam atau Bank Syariah di dunia perbankan tanah air dan kepuasan nasabah.

Berdasarkan analisis di atas disarankan kepada pihak Bank Muamalat Indonesia agar mempertimbangkan kembali kebijakan *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah sehingga sesuai dengan syariah Islam. Apakah merubah dari segi prosedurnya, persyaratannya, atau mungkin mencari alternatif kebijakan lain selain *special nisbah* agar kemaslahatan bersama tetap terjaga. Kepada Pihak nasabah juga disarankan untuk berpikir panjang sebelum mengambil keputusan untuk mengambil sebuah produk bank, apalagi yang berjangka seperti deposito. Pihak bank harus benar-benar mempertimbangkan bagi hasil yang akan didapat nantinya agar tidak menyesal di kemudian hari.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian .....	9
G. Definisi Operasional .....	9
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II KONSEP <i>MUDARABAH</i> , <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> DAN DEPOSITO <i>MUDARABAH</i> MENURUT FATWA DSN-MUI. ....	17
A. Hukum Perikatan .....	17
1. Hukum Perikatan .....	17
B. <i>Mudārabah</i> .....	20
C. Deposito Mudarabah.....	31

D. Dalil <i>Maslahah Mursalah</i> .....	39
<b>BAB III</b> <b>DESKRIPSI <i>SPECIAL NISBAH</i> DALAM AKAD DEPOSITO</b>	
<b>MUDARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG</b>	
<b>SURABAYA .....</b>	<b>55</b>
A. Sejarah Berdirinya Bank Mualamat Indonesia.....	55
B. Dasar Pemikiran Berdirinya Bank Mualamat Indonesia .....	58
C. Visi dan Misi Bank Mualamat Indonesia .....	59
D. Tujuan Bank Mualamat Indonesia.....	60
E. Produk-produk Bank Mualamat Indonesia .....	61
F. Deposito Mudarabah di Bank Mualamat Indonesia.....	64
1. Perjanjian Deposito Mudarabah.....	64
2. Prosedur Pelaksanaan deposito Mudarabah.....	65
3. Tata Cara akad Deposito Mudarabah.....	66
4. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudarabah.....	67
G. Pelaksanaan <i>Special Nisbah</i> dalam Akad Deposito Mudarabah di	
Bank Mualamat Indonesia .....	69
1. Prosedur Pengajuan <i>Special Nisbah</i> .....	69
2. Aplikasi Pelaksanaan Special nisbah dalam akad Deposito	
Mudarabah di Bank Mualamat Indonesia Cabang	
Surabaya.....	70
<b>BAB IV</b> <b>ANALISIS TERHADAP APLIKASI <i>SPECIAL NISBAH</i> DALAM</b>	
<b>AKAD DEPOSITO MUDARABAH DI BANK MUAMALAT CABANG</b>	
<b>SURABAYA ...</b>	<b>76</b>
A. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap	
Aplikasi <i>Special Nisbah</i> dalam Akad Deposito Mudarabah di	
Bank Mualamat Cabang Surabaya.....	76
B. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Aplikasi <i>Spesial</i>	
<i>Nisbah</i> dalam Akad deposito Mudarabah di bank Mualamat	
Cabang surabaya .....	82
<b>BAB V</b> <b>PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>







syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya Mudarabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudārib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Pada perbankan syariah dalam melakukan berbagai macam usaha tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, karena bank syariah pada kapasitasnya sebagai *mudārib* memiliki sifat wali amanah (*trustee*). Yakni harus berhati-hati atau bijaksana atau beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan serta kelalaian, dan walaupun ada sanksi apakah klausul denda atau pinalti tersebut telah ditulis dalam akad dan terdapat penjelasan kepada nasabah untuk disepakati bersama antara nasabah dengan bank, serta bagi hasil yang menjadi hak nasabah yang telah dibagikan karena dalam bagi hasil atau yang disebut dengan nisbah tidak boleh ada pihak yang dirugikan.

Deposito di bank syariah merupakan bentuk kerjasama pihak bank dengan nasabah. Nasabah sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelolanya. Terdapat perbedaan sistem deposito di bank syariah dan bank konvensional. Di bank syariah deposito menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dimana pemilik dana memberi kebebasan penuh kepada bank untuk mengelola investasinya dan hasil atau keuntungan dari pengelolaan dana investasi tersebut akan diperoleh sesuai *nisbah*/porsi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sedangkan deposito di bank konvensional adalah simpanan yang pencairannya dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu, kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai yang berlaku di bank masing-masing. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktu.

Di dalam bank syariah khususnya di Bank Muamalat terdapat perbedaan antara deposan dengan jumlah dana yang kecil dan deposan dengan dana yang besar. Untuk deposan dengan dana kurang dari satu milyar rupiah harus mematuhi ketentuan presentase bagi hasil yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Pada dasarnya ketentuan tersebut juga berlaku pada deposan dengan jumlah dana yang besar, yaitu di atas satu milyar rupiah. Namun menurut pihak bank, mereka menyiapkan strategi untuk mempertahankan deposan dengan jumlah dana yang besar tersebut. Strategi

yang dimaksud adalah yang dikenal dengan istilah *special nisbah*.

*Special nisbah* terjadi apabila deposan mengajukan perubahan ketentuan bagi hasil atau *nisbah* yang telah disepakati di awal karena beberapa sebab. Salah satu penyebabnya adalah adanya pihak ketiga (bank lain) yang menawarkan kepada deposan (pihak pertama) bagi hasil yang lebih tinggi dari ketentuan bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya antara deposan dan bank muamalat (pihak kedua). Dengan landasan strategi dalam mempertahankan nasabah seperti dijelaskan sebelumnya, akhirnya bank muamalat menyetujui adanya perubahan *nisbah* yang telah disetujui bersama di awal mengikuti permintaan deposan. Sehingga terjadi akad baru dalam pelaksanaan akad yang sedang berjalan, meskipun dalam kenyataannya tidak semua pengajuan *special nisbah* dikabulkan oleh pihak bank.

Dalam pelaksanaannya, *special nisbah* sering kali tidak dijelaskan di awal akad oleh pihak bank kepada deposan. Hal ini dikarenakan pihak bank merasa yang dijual adalah produk *Mudarabah*. Sedangkan *special nisbah* hanya sebagai strategi yang digunakan pihak bank untuk mempertahankan akad yang telah berjalan. Hal ini memberikan sedikit kesangsian tentang keterbukaan pihak bank terhadap para deposannya.

Permasalahan terkait adanya akad baru dalam akad yang sedang berjalan serta permasalahan keterbukaan bank terhadap para deposannya, hal







1. Analisis Perbandingan Penentuan Bagi Hasil Deposito Mudarabah Di BMI Kediri Dan BRI Syariah Kediri, ditulis oleh Mamik Mahmudah tahun 2007. Skripsi ini hanya membahas tentang penentuan perbandingan bagi hasil dalam deposito antara BMI Kediri dan BRI syariah Kediri.
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Nisbah Deposito Mudarabah Di BRI Kancab Surabaya, ditulis oleh Prakoso Yudho Lelono tahun 2009. Dalam pembahasan skripsi ini lebih ditekankan ke perubahan nisbah pada deposito tanpa sepengetahuan nasabah atau deposan.
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Deposito Mudarabah Dalam Peningkatan Penghimpunan Dana Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Kancab Kediri, ditulis oleh A. Billah tahun 2007. Skripsi ini membahas aplikasi produk deposito Mudarabah sebagai upaya untuk meningkatkan dana pada BMI.
4. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penalti Deposito Mudarabah Di BRI Kancab Surabaya, ditulis oleh Nona Ubaidillah Zaifi tahun 2008. Skripsi ini hanya membahas tentang penalti dalam deposito Mudarabah yang tidak ada ketentuannya di dalam fatwa DSN-MUI.



















BAB II, Konsep *Mudārabah*, *Maṣlaḥah Mursalah* Dan Deposito Mudarabah Mneurut fatwa DSN MUI: Hukum perikatan, Pengertian *Mudārabah*, Dasar hukum *Mudārabah*, Pengertian deposito Mudarabah, Dasar hukum deposito Mudarabah, Rukun dan syarat deposito Mudarabah, Jenis-jenis deposito Mudarabah, Aplikasi deposito Mudarabah, teori *maṣlaḥah mursalah*, dalil dasar, syarat-syarat menjadikan hujjah *maṣlaḥah mursalah*, pendapat para ulama terhadap *maṣlaḥah mursalah*, .

BAB III, Deskripsi *Special nisbah* dalam akad deposito mudarabah di Bank Muamalat Kancab Surabaya meliputi: Latar belakang dan sejarah berdirinya Bank Muamalat kancab Surabaya, Struktur organisasi, visi dan misi serta produk operasional Bank Muamalat kancab Surabaya, Prosedur pelaksanaan deposito Mudarabah, Syarat-syarat dan pelaksanaan akad *special nisbah*, aplikasi akad *special nisbah*.

BAB IV, Analisis Terhadap Aplikasi *Special nisbah* dalam akad deposito mudarabah di Bank Muamalat Kancab Surabaya meliputi: Analisis KHES dan *maṣlaḥah mursalah* terhadap aplikasi *special nisbah*.

Bab V, Penutup meliputi: Kesimpulan, Saran.

## BAB II

### KONSEP *MUDARABAH*, *MAŞLAHAH MURSALAH* DAN DEPOSITO *MUDARABAH* MENURUT FATWA DSN MUI

#### A. Hukum Perikatan dalam Islam

##### 1. Hukum Perikatan

Hukum Perikatan Islam dijadikan pilot project dalam penelitian hukum Islam, yang berorientasi pada pengembangan teori umum tentang hukum Islam. Kajian ini menjadi signifikan karena lahirnya beberapa institusi syari'ah yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dan mu'amalat Islam, serta semakin berkembangnya bisnis umat Islam yang diiringi munculnya keinginan untuk menyalurkan bisnis sebagai fenomena modern, dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang orisinal.<sup>1</sup>

Kajian mengenai Hukum Perikatan Islam, termasuk ke dalam penelitian hukum Islam normatif, yaitu untuk mendapatkan peraturan-peraturan hukum yang kongkrit (*al-aḥkam al-far'iyah*) yang merupakan pengembangan dari al-usul al-kuliyah (norma-norma antara/ doktrin hukum Islam), yang juga diturunkan dari nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*) dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

---

<sup>1</sup> Rusydi, "Kuliah Hukum Perikatan Islam," dalam <http://www.syariaheconomic.net> (4 Mei 2012)

Hukum perikatan didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu wajib berprestasi, dan pihak lainnya berhak atas prestasi. Dengan demikian yang menjadi obyek hukum dari suatu perikatan adalah prestasi atau pemenuhan perikatan. Dalam hukum positif prestasi dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu seperti membayar harga, menyerahkan barang, dsb.
- b. Berbuat sesuatu seperti memperbaiki barang yang rusak, membongkar bangunan, dsb.
- c. Tidak berbuat sesuatu seperti tidak menggunakan merk dagang, dst.

Dengan diadakannya suatu perikatan maka timbul apa yang disebut hak perseorangan relatif (*persoonlijke rechten*), yaitu hak-hak yang hanya dimiliki oleh masing-masing pihak yang terkait oleh suatu perikatan atau orang-orang yang berkepentingan saja.

Dalam hukum positif suatu perikatan dapat muncul atau bersumber dari dua hal, yaitu dari perjanjian (kontrak/akad), dan dari undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang dibedakan menjadi dua macam yaitu: Perikatan yang bersumber dari Undang-undang





































































pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas *maṣlahah* yang bersifat dugaan.

- b. Berupa *maṣlahah* yang umum, bukan *maṣlahah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan ummat manusia, atau dapat menolak *maḍarat* dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariahkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisasikan *maṣlahah* secara khusus kepada Amir, atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat dan kemaslahatannya. Jadi *maṣlahah* itu harus dapat diambil manfaatnya bagi mayoritas umat manusia.
- c. Pembentukan hukum bagi *maṣlahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *naṣ* atau *ijma'*. Jadi tidak sah mengakui *maṣlahah* yang menuntut adanya kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka, karena masalah ini adalah masalah yang dibatalkan.







Atas dasar ini, jelaslah bahwa dari segi kelompok pertama ini *masalah mursalah* itu merupakan bagian dari tujuan syariah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam *nas*.

- 2) Adapun selanjutnya, seperti dijelaskan oleh Zaky Al-Din Sya'ban, bahwa sesungguhnya tujuan penyari'atan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus berkembang dengan perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tidak dicermati secara seksama dan tidak diresponi dengan ketepatan yang sesuai, kecuali hanya terpaku kepada adanya dalil yang mengakuinya, niscaya kemaslahatan itu akan dari kehidupan manusia serta akan berhentilah pertumbuhan hukum. Padahal sikap yang tidak memperhatikan perkembangan masalah adalah tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan syariah yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia. Alasan ini merupakan kata kunci bagi kelompok pertama dalam mempertahankan kedudukan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* syariah. Sebab kemaslahatan yang terdapat di setiap tempat itu diabaikan, sementara ia masih tetap sejalan dengan kehendak



- 2) Sesungguhnya *maṣlaḥah mursalah* dalam penetapan hukum adalah menempuh jalan berdasarkan hawa nafsu dan hal seperti ini tidak diperbolehkan.
- 3) Kemudian kelompok kedua ini mengatakan bahwa menggunakan *maṣlaḥah mursalah* berarti akan menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan. Sesungguhnya kemaslahatan itu, sebagaimana kita saksikan, akan selalu berubah dengan terjadinya perubahan zaman dan situasi. Tentu hal ini akan menghilangkan fungsi keumuman syariah dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat.

Dari perbedaan pendapat antara kelompok yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* syar'iyah dengan kelompok yang menolaknya, serta alasan mereka masing-masing, ternyata akar perbedaannya terletak pada posisi pandangan mereka masing-masing tentang *maṣlaḥah mursalah* itu sendiri. Kelompok pertama yang diwakili oleh Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad Ibnu Hambal berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang berpijak pada syarat-syarat yang dibenarkan oleh syara', bukan berdasarkan hawa nafsu atau penyimpangan dari kebenaran seperti pandangan kelompok kedua. Jika kelompok kedua yang diwakili oleh madhab Hanafi, Syafi'i dan madhab Zahiri berpendapat bahwa

*maṣlahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang diragukan dan tidak dapat dijadikan *hujjah*, maka menurut kelompok pertama tidak benar. Menurut kelompok pertama *maṣlahah mursalah* berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariah. Bagi kelompok pertama, kemaslahatan di samping apa yang disebutkan oleh *naṣ* juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikehendaki oleh syara' untuk dipelihara dengan memperhatikan keserasiannya untuk mewujudkan kemaslahatan itu, meskipun tidak ada *naṣ* yang menjelaskannya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariah. Kemaslahatan seperti inilah yang disebut dengan *maṣlahah mursalah*.

Sebaliknya kelompok kedua, menjelaskan semua kemaslahatan sudah dijelaskan oleh *naṣ* baik yang diterima maupun yang ditolak, jika berusaha mencari kemaslahatan selain ketentuan *naṣ*. Madhab Zahiri menyebutkan bahwa maslahat yang mereka terima adalah maslahat yang disebutkan dalam *naṣ* secara jelas dan mereka menolak jika tidak ditunjukkan oleh *naṣ*. Madhab Zahiri menolak *maṣlahah mursalah* sebab tidak dijelaskan oleh *naṣ*. Bahkan menurut mereka menggunakan *maṣlahah mursalah* bisa menimbulkan kerusakan, karena berdasarkan akal semata. Pandangan ini sejalan pula dengan pengikut Syafi'i, Hanafi yang melarang ber*hujjah* dengan *maṣlahah mursalah*. Akan tetapi pendapat ini mengatakan bahwa imam Syafi'i dengan sebagian pengikut imam Hanafi









perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.







































Nisbah Cab. Surabaya Darmo) dan tanggal dikeluarkannya memo.

- 2) Tujuan, berisi tentang tujuan dikeluarkannya memo ini, dalam hal ini untuk mendapat persetujuan pemberian *special nisbah*. Sekaligus juga berhubungan dengan deposito sebagaimana terlampir terhadap nasabah, apakah untuk fresh fund, perpanjangan, nasabah baru atau nasabah lama.
- 3) Latar Belakang, berisi tentang alasan diajukan *special nisbah*. Yang mana setiap nasabah memiliki alasan sendiri-sendiri dan bersifat rahasia.
- 4) Rekomendasi, berisi tentang permohonan kebijakan untuk persetujuan atas pemberian *special nisbah* deposito dengan data terlampir.
- 5) Form Persetujuan dan Tanda Tangan, berisi tanda tangan *Branch Manager* dan *Relationship Manager* serta Disposisi/Persetujuan dari *Treasury Division Head*.

Karena keterbatasan akses terkait dokumen yang bersangkutan, sehingga penulis tidak bisa menampilkan memo secara *real* atau asli. Pihak bank menilai hal tersebut bersifat privasi dan rahasia, baik untuk kemaslahatan pihak bank maupun pihak nasabah, serta memo tersebut









1. Memberikan sesuatu seperti membayar harga, menyerahkan barang, dsb.
2. Berbuat sesuatu seperti memperbaiki barang yang rusak, membongkar bangunan, dsb.
3. Tidak berbuat sesuatu seperti tidak menggunakan merk dagang, dst.

Dengan diadakannya suatu perikatan maka timbul apa yang disebut hak perseorangan relatif (*persoonlijke rechten*), yaitu hak-hak yang hanya dimiliki oleh masing-masing pihak yang terkait oleh suatu perikatan atau orang-orang yang berkepentingan saja.

Dalam hukum positif suatu perikatan dapat muncul atau bersumber dari dua hal, yaitu dari perjanjian (kontrak/akad), dan dari undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang dibedakan menjadi dua macam yaitu: 1) perikatan yang bersumber dari undang-undang saja, dan 2) perikatan yang bersumber dari undang-undang yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik yang sesuai hukum maupun yang melawan hukum

Dalam hukum Islam, perikatan disebut *iltizam*. Menurut istilah fiqh, perikatan (*iltizam*) ini didefinisikan sebagai: "Suatu tindakan yang meliputi: pemunculan, pemindahan, dan pelaksanaan hak." Definisi perikatan ini sejalan dengan pengertian akad (perjanjian) dalam arti umumnya selain juga tercakup



kedalamnya pengerian tasaruf dan kehendak pribadi. Perikatan dapat muncul dari perseorangan (seperti wakaf, wasiat, dll.), maupun dari dua belah pihak (sepert jual-beli, ijarah, dll).

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, perikatan dalam perspektif UU Islam (*qanun*) didefinisikan sebagai: “Keadaan tertentu seseorang yang ditetapkan syariah untuk dilakukan atau tidak dilakukan demi mewujudkan kemaslahatan pihak lain.”

Sesuatu atau peristiwa yang menimbulkan terjadinya perikatan disebut sebagi sumber perikatan (*masdar al-iltizam*). Sumber-sumber perikatan tersebut dalam hukum Islam adalah: akad, kehendak pribadi, perbuatan melawan hukum, perbuatan sesuai hukum, dan syariah. Macam-macam sumber perikatan tersebut pada hakikatnya dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu: akad, Undang-undang (*qanun*), dan kehendak perorangan.

Sehingga sebagaimana telah dijelaskan di atas, perjanjian (akad) merupakan sumber perikatan. Dengan terjadinya akad maka akan menimbulkan konsekwensi pada pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut, yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi substansi akad adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’, yang menimbulkan akibat-akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1:









## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dan analisa terhadap *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah studi kasus di Bank Muamalat Indonesia Kancab Surabaya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. *Special nisbah* dalam akad deposito mudarabah merupakan akad perubahan bagi hasil deposito Mudarabah di dalam Bank Muamalat Indonesia. Di dalam proses pengajuan akad tersebut, pihak nasabah menginginkan diberlakukannya akad bagi hasil yang baru dan menghapus akad bagi hasil yang lama, dikarenakan terlibatnya pihak ketiga atau bank kompetitor lain yang bisa memberikan bagi hasil yang lebih banyak. Namun dalam pelaksanaannya, pengajuan *special nisbah* hanya dikabulkan oleh pihak bank, selama kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.
2. Dalam tinjauan *maṣlaḥah mursalah* dan fatwa DSN-MUI, pelaksanaan *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah diperbolehkan, karena pihak bank maupun pihak nasabah memiliki pertimbangan sendiri-sendiri yang dijadikan acuan atau dasar. Segala pertimbangan tersebut nantinya







